

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2017. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good govermance*) yang tertuang dalam Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Bululawang Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemeintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Bululawang. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bias menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya. Semoga bermanfaat. Amin

Bululawang, 26 Januari 2017

CAMAT BULULAWANG,

Drs. CHOLIK. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19590503 198508 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN

BULULAWANG TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capain Renstra.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bululawang.....	14
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bululawang.....	35
3.3 Program dan Kegiatan	36

BAB IV PENUTUP	43
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016 Kecamatan Bululawang.....	Hal 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bululawang	Hal 16
Tabel 2.3 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017	Hal 27
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017	Hal 33
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2017 dan Prakiraan maju Tahun 2018 Kecamatan Bululawang.....	Hal 38

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BULULAWANG
NOMOR: 188.45/ 01 /KEP/35.07.014/2017
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
BULULAWANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017

**RENCANA KERJA
KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bululawang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Proses penyusunan Rencana Kerja mulai dilakukan setelah surat Bupati Malang Nomor : 050.13/1924/35.07.203/2016 tanggal 16 Maret 2016 Hal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD 2017, Kecamatan Bululawang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bululawang, yang menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017. Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 583 /KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Serta surat Bupati Malang tanggal 18 November 2016 Nomor : 050.13/7675/35.07.032/2016 Hal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah 2017, Kecamatan Bululawang menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Pada tanggal 30 November 2016 dilakukan koordinasi dan verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara bersama-sama sehingga tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bululawang untuk kemudian diajukan pengesahan kepada Bupati.

Kecamatan Bululawang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Malang, mempunyai peranan yang strategis terutama sebagai salah satu wilayah penyangga percepatan pembangunan Kabupaten Malang Selatan. Untuk itu diharapkan mampu mengikuti percepatan pembangunan Daerah terutama pada sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain pertanian dan industri serta mengharuskan dukungan kinerja pemerintah yang baik sebagai penyelenggara pelayanan publik.

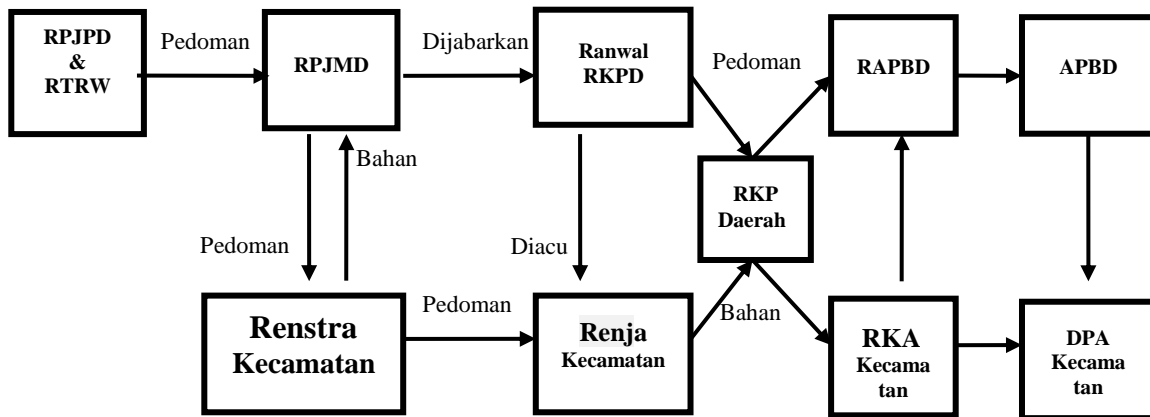
Sejalan dengan tuntutan tersebut, perlu diupayakan langkah-langkah operasional dan strategis untuk merealisasikannya. Langkah / tindakan - tindakan operasional dimaksud dituangkan dalam rencana kerja, melalui metode pendekatan dan strategi yang tepat, sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sumberdaya yang dimiliki serta didukung oleh potensi aparat pemerintah daerah yang mampu untuk menjabarkan dan mengimplementasikan segala rencana kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Penyusunan perencanaan itu sendiri tentunya juga memerlukan berbagai penilaian / evaluasi yang dapat diukur, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatannya bisa terwujud sistem kerja yang efektif dan efisien. Pejabaran dari perencanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Bululawang disusun dalam suatu Rencana Kerja Kecamatan, yang menjadi pedoman kerja seluruh jajaran aparat Kecamatan Bululawang dan seluruh jajaran dinas / instansi yang ada di wilayah Kecamatan agar pelaksanaan kegiatannya berlangsung secara sinergis dan terkoordinasi.

Keterkaitan Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016, Kecamatan Bululawang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bululawang. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bululawang Tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bululawang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bululawang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bululawang tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bululawang tahun 2017, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bululawang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Bululawang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;
 24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.4/601/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bululawang Tahun 2016-2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam pemerintahan Kecamatan Bululawang serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2017 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bululawang tahun 2017 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bululawang Tahun 2016 – 2021 dan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2017 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah.
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Bululawang tahun 2017 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BULULAWANG TAHUN 2016

- 1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bululawang Tahun Lalu 2016 dan Capaian Renstra Kecamatan Bululawang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bululawang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bululawang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bululawang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BULULAWANG
TAHUN 2016

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2016 Kecamatan Bululawang melaksanakan 7 program dan 17 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai tahun 2016 dapat terealisasi rata-rata 17% dalam periode Renstra Kecamatan Bululawang Tahun 2016-2021. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 17%.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 17 kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2016 adalah rata-rata 100%.

Adapun realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d th. 2014 (kolom 5 tabel 2.1), Target dan kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015, Target Renja PD Tahun 2015 (kolom 6 tabel 2.1), Realisasi Renja PD Tahun 2015 (kolom 7 tabel 2.1) dan Tingkat Realisasi (%) (kolom 8 tabel 2.1) tidak ditampilkan karena terkait merupakan target dan realisasi pada periode Renstra Kecamatan Bululawang yang lalu (tahun 2010-2015).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2016 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capa ian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	17 %	17 %	17 %
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	8.898 surat	-	-	-	-	1.483 surat	1.483 surat	17 %

1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	7 rekening	-	-	-	-	7 rekening	7 rekening	17 %
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	72 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	17 %
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	6 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	17 %
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	17 %
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perawatan Perlengkapan	6 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	17 %
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000 Pack	-	-	-	-	2000 Pack	2000 Pack	17 %
1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah orang yang diberi Tugas Konsultasi ke Dalam Daerah	98 orang	-	-	-	-	14 orang	14 orang	17%

2	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	17 %	17 %	17 %
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	17 %
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	30 unit	-	-	-	-	5 unit	5 unit	17 %
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	48 unit	-	-	-	-	8 unit	8 unit	17 %
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	36 unit	-	-	-	-	6 unit	6 unit	17 %
3	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	100 %	-	-	-	-	17 %	17 %	17 %
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Pelatihan Formal	12 Kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	17 %

4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	-	-	-	-	17 %	17 %	17 %
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	42 laporan	-	-	-	-	7 laporan	7 laporan	17 %
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kelancaran proses administrasi kependudukan KTP-Kk dan Mutasi	100%	-	-	-	-	17 %	17 %	17 %
5.1	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi	1=8640 2=3000 3=3000	-	-	-	-	1=1440 2=500 3=500	1=1440 2=500 3=500	17 %
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Keaktifan Siskamling	71,59 %	-	-	-	-	68,18 %	68,18 %	95,23 %
6.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling	12 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	17 %

7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	75 %	-	-	-	-	68,89 %	68,89 %	91,85 %
7.1	Penyeleng garaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	6 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	17 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bululawang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Bululawang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Bululawang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bululawang selama periode Renstra tahun 2016-2021 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Bululawang pada tahun 2016 dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Adapun target Renstra dan realisasi capaian tahun 2015 tidak diisi/dikosongkan dikarenakan tahun 2015 merupakan periode renstra tahun 2011-2015 sedangkan tahun 2016 merupakan tahun awal periode renstra 2016-2021.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Bululawang, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;

2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bululawang dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

Tabel 2.2**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bululawang												
1	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	-	-	-	68,89 %	70 %	72 %	-	68,89 %	70 %	72 %	
2	Persentase Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	-	-	-				-				
	a. KTP				100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %
	b. KK				100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Pindah Tempat				100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Tingkat Keaktifan Dalam Kegiatan Siskamling	-	-	-	68,18 %	69,31 %	69,88 %	-	68,18 %	69,31 %	69,88 %	

Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Bululawang												
1	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran			-	17 %	17 %	17 %	-	17 %	17 %	17 %	
1.1	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar			-	1.483 surat	1.483 surat	1.483 surat	-	1.483 surat	1.483 surat	1.483 surat	
1.2	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik			-	7 rekening	7 rekening	7 rekening	-	7 rekening	7 rekening	7 rekening	
1.3	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor			-	12 kali	12 kali	12 kali	-	12 kali	12 kali	12 kali	
1.4	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor			-	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	
1.5	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	
1.6	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perawatan Perlengkapan			-	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	
1.7	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman			-	2000 Pack	2000 Pack	2000 Pack	-	2000 Pack	2000 Pack	2000 Pack	
1.8	Jumlah orang yang diberi Tugas Konsultasi ke Dalam Daerah			-	14 orang	14 orang	14 orang	-	14 orang	14 orang	14 orang	

2	Cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	-	-	-	17 %	17 %	17 %	-	17 %	17 %	17 %	
2.1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			-	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	
2.2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			-	5 unit	5 unit	5 unit	-	5 unit	5 unit	5 unit	
2.3	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan			-	8 unit	8 unit	8 unit	-	8 unit	8 unit	8 unit	
2.4	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				6 unit	6 unit	6 unit		6 unit	6 unit	6 unit	
3.	Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	-	-	-	17 %	17 %	17 %	-	17 %	17 %	17 %	
3.1	Jumlah Kegiatan Pelatihan Formal			-	2 kali	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	
4.	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	-	-	17 %	17 %	17 %	-	17 %	17 %	17 %	
4.1	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun tepat waktu dan akuntabel			-	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	

5.	Persentase kelancaran proses administrasi kependudukan KTP-Kk dan Mutasi	-	-	-	68,18 %	69,31 %	69,88 %	-	68,18 %	69,31 %	69,88 %	
5.1	Jumlah Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi			-	1 = 1440 2 = 500 3 = 500	1 = 1440 2 = 500 3 = 500	1 = 1440 2 = 500 3 = 500	-	1 = 1440 2 = 500 3 = 500	1 = 1440 2 = 500 3 = 500	1 = 1440 2 = 500 3 = 500	
6.	Prosentase Keaktifan Siskamling	-	-	-	17 %	17 %	17 %	-	17 %	17 %	17 %	
6.1	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling			-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	
7.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	-	-	-	68,18 %	69,31 %	69,88 %	-	68,18 %	69,31 %	69,88 %	
7.1	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan			-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang ada Kecamatan Bululawang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan Keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bululawang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b) Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai akta lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.
- c) Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Kepengurusan Kependudukan.

Adapun upaya - upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP - Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa,

sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Tata Pemerintahan Desa, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Bululawang tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistim administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pertanahan Dan Aset

- 1) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 2) Adanya SPPT ganda;
- 3) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Ekonomi Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;

- 3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bululawang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Bululawang, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
- b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
- c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei 2016.

Dalam Review Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 terhadap Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Bululawang tahun 2017 terdapat perbedaan diantaranya :

1. Dalam RKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan dan hasil Analisis Rencana Kerja dan Anggaran kecamatan kedua Program tersebut dialihkan ke Laporan Kinerja SKPD.
2. Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada RKPD sebesar Rp. 28.410.000 menjadi Rp. 16.410.000, dikarenakan untuk mengefisienkan anggaran.
3. Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada RKPD sebesar Rp. 278.618.000 menjadi Rp. 286.645.000, dikarenakan kebutuhan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkat.
4. Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada RKPD sebesar Rp. 17.500.000 menjadi Rp. 13.500.000, dikarenakan kebutuhan kegiatan menurun dan untuk mengefisienkan anggaran.
5. Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada RKPD sebesar Rp. 49.350.000 menjadi Rp. 65.400.000, dikarenakan kebutuhan pada kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan meningkat.
6. Anggaran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada RKPD sebesar Rp. 30.103.000 menjadi Rp. 30.030.000, dikarenakan untuk mengefisienkan anggaran.
7. Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik pada RKPD sebesar Rp. 8.650.000 menjadi Rp. 8.750.000, dikarenakan kebutuhan dalam kegiatan penyediaan komponen Instalasi listrik meningkat.
8. Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman pada RKPD sebesar Rp. 63.500.000 menjadi Rp. 59.450.000, dikarenakan kebutuhan kegiatan menurun dan untuk mengefisienkan anggaran.

9. Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada RKPD sebesar Rp. 135.366.000 menjadi Rp. 132.823.000, dikarenakan kebutuhan kegiatan menurun dan untuk mengefisienkan anggaran.
10. Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada RKPD sebesar Rp. 25.900.000 menjadi Rp. 18.141.000, dikarenakan kebutuhan kegiatan menurun dan untuk mengefisienkan anggaran.
11. Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada RKPD sebesar Rp. 53.481.000 menjadi Rp. 52.952.000, dikarenakan kebutuhan kegiatan menurun dan untuk mengefisienkan anggaran.
12. Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada RKPD sebesar Rp. 49.440.000 menjadi Rp. 55.185.000, dikarenakan kebutuhan kegiatan meningkat.
13. Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada RKPD sebesar Rp. 15.120.000 menjadi Rp. 18.720.000, dikarenakan kebutuhan kegiatan meningkat.
14. Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada RKPD sebesar Rp.10.026.000 menjadi Rp. 12.942.000, dikarenakan kebutuhan kegiatan meningkat.

Uraian hasil Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana Rp	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bululawang	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	278.618.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bululawang	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	286.645.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bululawang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	8.898 surat	17.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bululawang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1.483 surat	13.500.000	
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Bululawang	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	7 rekening	9.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Bululawang	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	7 rekening	9.600.000	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Orang Yang Diberikan	12 kali	49.350.000	Penyediaan Jasa Administrasi	Kecamatan Bululawang	Jumlah Orang Yang Diberikan	12 kali	65.400.000	

			Honor			Keuangan		Honor			
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	30.103.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	30.030.000	
1.5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	17.550.000	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	17.550.000	
1.6	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perawatan Perlengkapan	1 paket	8.650.000	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perawatan Perlengkapan	1 paket	8.750.000	
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Bululawang	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	2000 Pack	63.500.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Bululawang	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	2000 Pack	59.450.000	
1.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Bululawang	Jumlah Orang yang diberi tugas konsultasi ke Dalam Daerah	14 orang	82.365.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Bululawang	Jumlah Orang yang diberi tugas konsultasi ke Dalam Daerah	14 orang	82.365.000	

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Bululawang	Cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100 %	135.366.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Bululawang	Cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100 %	132.823.000	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	25.900.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	18.141.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	53.481.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	52.952.000	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Bululawang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	8 unit	49.440.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Bululawang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	8 unit	55.185.000	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6 unit	6.545.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6 unit	6.545.000	

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kecamatan Bululawang	Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	100 %	15.120.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kecamatan Bululawang	Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	100 %	18.720.000	
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Pelatihan Formal	5 orang	15.120.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Pelatihan Formal	5 orang	18.720.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Bululawang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100 %	24.410.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Bululawang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100 %	16.410.000	
4.1	Laporan Kinerja SKPD	Kecamatan Bululawang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan tepat waktu dan akuntabel	4 laporan	16.410.000	Laporan Kinerja SKPD	Kecamatan Bululawang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan tepat waktu dan akuntabel	7 laporan	16.410.000	

4.2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Bululawang	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang tepat waktu dan akuntabel	4 laporan	4.000.000	-	-	-	-	-	
4.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang tepat waktu dan akuntabel	4 laporan	4.000.000	-	-	-	-	-	
5	Program Administrasi Kependudukan	Kecamatan Bululawang	Prosentase kelancaran proses Administrasi Kependudukan KTP, KK dan Mutasi	100 %	7.260.000	Program Administrasi Kependudukan	Kecamatan Bululawang	Prosentase kelancaran proses Administrasi Kependudukan KTP, KK dan Mutasi	100 %	7.260.000	
5.1	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi	1=1728 2=600 3=600	7.260.000	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi	1=1728 2=600 3=600	7.260.000	

6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Bululawang	Prosentase Keaktifan siskamling	100 %	25.200.000	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Bululawang	Prosentase Keaktifan siskamling	100 %	25.200.000	
6.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Keamanan Lingkungan di Poskamling	12 kali	25.200.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Keamanan Lingkungan di Poskamling	2 kali	25.200.000	
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Bululawang	Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Melaksanakan Musrenbang	100 %	10.026.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Bululawang	Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Melaksanakan Musrenbang	100 %	12.942.000	
7.1	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	10.026.000	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	12.942.000	
	Jumlah				500.000.000					500.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bululawang sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2017.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2017, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Fungsi Kecamatan Bululawang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program Pelayanan Administrasi Terpadu merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan Bululawang juga melaksanakan pengarusutamaan Gender sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di

bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Bululawang

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bululawang adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bululawang.

b. Sasaran

1. Meningkatkan pola koordinasi/fasilitasi dan motivasi di segala bidang pembangunan;

2. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM Aparatur;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana prasarana.

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2017 Kecamatan Bululawang melaksanakan 7 program dan 17 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- g. Penyediaan makanan dan minuman;
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- i. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

3. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- b. Laporan Kinerja SKPD

5. Program Administrasi Kependudukan.

- a. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

- a. Pengendalian Keamanan Lingkungan

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2017 dan Prakiraan maju Tahun 2018
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05.4.05.7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kec. Bulula wang	100 %	286.645.000	APBD		100 %	286.645.000
4.05.4.05.7. 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Bulula wang	1483 surat	13.500.000	APBD		100 %	13.500.000
4.05.4.05.7. 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	Kec. Bulula wang	7 rekening	9.600.000	APBD		100 %	9.600.000
4.05.4.05.7. 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	Kec. Bulula wang	12 kali	65.400.000	APBD		100 %	65.400.000

4.05.4.05.7. 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kec. Bululawang	1 paket	30.030.000	APBD		100 %	30.030.000
4.05.4.05.7. 01 . 11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bululawang	1 paket	17.550.000	APBD		100 %	17.550.000
4.05.4.05.7. 01 . 12	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perawatan Perlengkapan	Kec. Bululawang	1 paket	8.750.000	APBD		100 %	8.750.000
4.05.4.05.7. 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Bululawang	2000 Pack	59.450.000	APBD		100 %	59.450.000
4.05.4.05.7. 01 . 21	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Orang yang diberi tugas konsultasi ke Dalam Daerah	Kec. Bululawang	14 orang	82.365.000	APBD		100 %	82.365.000
4.05.4.05.7.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	Kec. Bululawang	100 %	132.823.000	APBD		100 %	132.823.000
4.05.4.05.7. 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kec. Bululawang	1 paket	18.141.000	APBD		100 %	18.141.000

4.05.4.05.7. 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kec. Bululawang	5 unit	52.952.000	APBD		100 %	52.952.000
4.05.4.05.7. 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Kec. Bululawang	8 unit	55.185.000	APBD		100 %	55.185.000
4.05.4.05.7. 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Bululawang	6 unit	6.545.000	APBD			6.545.000
4.05.4.05.7 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	Kec. Bululawang	100 %	18.720.000	APBD		100 %	18.720.000
4.05.4.05.7. 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Kegiatan Pelatihan Formal	Kec. Bululawang	2 kali	18.720.000	APBD		100 %	18.720.000

4.05.4.05.7 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Bululawang	100 %	16.410.000	APBD		100 %	16.410.000
4.05.4.05.7 . 06. 01	Laporan Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan tepat waktu dan akuntabel	Kec. Bululawang	7 jenis laporan	16.410.000	APBD		100 %	16.410.000
2.06.4.05.07.15	Program Administrasi Kependudukan	Prosentase kelancaran proses Administrasi Kependudukan KTP, KK dan Mutasi	Kec. Bululawang	100 %	12.942.000	APBD		100 %	12.942.000
2.06.4.05.07.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi	Kec. Bululawang	1=1440 2=500 3=500	12.942.000	APBD		100 %	12.942.000

1.05.4.05.7 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Keaktifan siskamling	Kec. Bululawang	100 %	25.200.000	APBD		100 %	25.200.000
1.05.4.05.7 . 15. 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Keamanan Lingkungan di Poskamling	Kec. Bululawang	2 Kali	25.200.000	APBD		100 %	25.200.000
4.01.4.05.7.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Melaksanakan Musrenbang	Kec. Bululawang	100 %	12.942.000	APBD		100 %	12.942.000
4.01.4.05.7.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Bululawang	1 kegiatan	12.942.000	APBD		100 %	12.942.000
	JUMLAH	17 Kegiatan			500.000.000				500.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bululawang Tahun 2017 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bululawang Tahun 2016 – 2021.

Pada tahun 2017 Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bululawang ini terdapat 7 program dan 17 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Renja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2017, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2017 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bululawang Tahun 2017 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT BULULAWANG,

Drs. CHOLIK. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19590503 198508 1 001